

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi Nugroho, Susanti. 2020. *Hukum Kepailitan Di Indonesia – Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Cetakan ke-2. Prenadamedia Group. Kencana. Jakarta.

Aprita, Serlika. 2018. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*. Setara Press. Malang.

Arba, H.M. 2019. *Hukum Pengadaan Tanah Umtuk Kepentingan Umum*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Asikin, Zainal. 2013. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*. Cetakan I. Pustaka Reka Cipta. Bandung.

_____, 2022. *Hukum Kepailitan*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid I. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.

Burrill, Alexander M. 1998. *A New Law Dictionary and Glossary: Containing Full Definition of the Principal Terms of the Common and Civil Law, Together with Translations and Explanations of the Various, Technical Phrases, Law Maxims*. Part I. The Lawbook Exchange, Ltd. Union. New Jersey.

Christiawan, Rio. 2020. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Edisi 1. Cet. 1. Rajawali Pers. Depok.

Fellmeth, Aaron X. and Maurice Horwitz. 2009. *Guide to Latin in International Law*. Oxford University Press. New York.



Munir. 2017. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Cetakan ke VI. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Buku Kesatu. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____, 2018. *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*. Buku kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Gourgourinis, Anastasios. 2016. *Equity and Equitable Principle in the World Trade Organization*. Routledge. New York.
- Hartini, Rahayu. 2020. *Hukum Kepailitan*. Edisi Revisi. Cetakan kelima, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Herring, Pendleton. 1936. *Public Administration in the Public Interest*. New York: McGraw-Hill Book Company. Inc.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan 1. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Johnston, Jane. 2016. *Public Relations and the Public Interest*. Routledge. Taylor and Francis Group. New York.
- Kusmayadi, Dedi. Dedi Rudiana dan Jajang Badruzaman. 2015. *Good Corporate Governance*. LPPM Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.
- Lloyd's, 2008. *Introduction to Jurisprudence*. Eighth Edition. By M.D.A Freeman. LL.M. Publishing by Thomson Reuters (Legal) Limited.
- Locke, John. 1823. *Two Treatises of Government*. A New Edition In Ten Volumes. Vol. V. London: Printed for Thomas Tegg; W. Sharpe and Son; G. Offor; G and J. Robinson; J. Evans and Co. Also R. Griffin and Co. Glasgow and J. Gumming. Dublin.
- Lontoh, Rudhy A. dkk. 2001. *Penyelesaian Utang – Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cetakan ke-1. Penerbit Alumni. Bandung.



ombach De Colquhoun, Patrick. *A Summary of The Roman Civil Law*. MDCCCLIV (1854). Vol. III. V. and R. Stevens and Sons.

(Late Stevens and Norton). Law Booksellers and Publishers. 26. Bell Yard. Lincoln's Inn. London.

Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Teori Hukum*. Cetakan I. CV. Maha Karya Pustaka. Yogyakarta.

Mulyana, Asep N. 2019. *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*. PT. Grasindo. Jakarta.

Murphy, Jeffrie G. and Jules L. Coleman. 1984. *The Philosophy of Law an Introduction to Jurisprudence*. by Rowman & Allanheld Publishers. United States of America.

Nainggolan, Bernard. 2015. *Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Cetakan ke-1. PT. Alumni. Bandung.

Prayoga, Andhika. 2014. *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*. Cetakan Pertama. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Priyo Amboro, Yudi. 2020. *Hukum Kepailitan – Penerapan Hukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris dan Australia*. Cetakan Pertama. Setara Press. Malang.

Randa Puang. Victorianus M.H. 2011. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Cetakan 1. PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera. Bandung.

Rapalje, Stewart. and Robeth L. Lawrence. 1997. *A Dictionary of American and English Law, with Definition of the Technical Terms of the Canon and Civil Law*. Vol. I. The Lawbook Exchange. Ltd. Union. New Jersey.

Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*. Revised Edition. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge. Massachusetts.

Remy Sjahdeini, Sutan. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*. Edisi Kedua. Kencana-Prenadamedia Group. Jakarta.



onald dan Michael Nussy. 2020. *Hukum Kepailitan – Kreditur Dalam Pailit*. Cetakan Pertama. Deepublish. Sleman. Yogyakarta.

- Sarra, Janis. 2003. *Creditor Rights and The Public Interest: Restructuring Insolvent Corporations*. University of Toronto Press. Toronto Buffalo London. Canada.
- Scarre, Geoffrey. 1996. *The Problems Of Philosophy Utilitarianism*. Cetakan pertama. Routledge 11 New Fetter Lane. London.
- Shubhan, M. Hadi. 2019. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan*. Cetakan ke-6. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. Cetakan Ke XI. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Suseno, Frans Magnis. 1994. *Etika Pilitik*. Gramedia. Jakarta.
- _____, 1998. *13 tokoh etika*. Kanisius. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Kedelapan. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Tarigan, Andi. 2018. *Tumpuan Keadilan Rawls Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan?*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

B. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (LNRI Tahun 1960 Nomot 156, TLNRI Nomor 2104).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 Nomor 1, TLNRI Nomor 3019).



Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (LNRI Tahun 1983 Nomor 50, TLNRI Nomor 3263).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Umum (LNRI Tahun 1986 Nomor 20, TLNRI Nomor 3327).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LNRI Tahun 1986 Nomor 77, TLNRI Nomor 3344).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (LNRI Tahun 1992 Nomor 116, TLNRI Nomor 3502).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (LNRI Tahun 1995 Nomor 64, TLNRI Nomor 3608).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 1998 Nomor 135, TLNRI Nomor 3778).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (LNRI Tahun 1999 Nomor 66, TLNRI Nomor 3843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 Nomor 140, TLNRI Nomor 387).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (LNRI Tahun 1999 Nomor 154, TLNRI Nomor 3881).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 2000 Nomor 208).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (LNRI Tahun 2001 Nomor 110, TLNRI Nomor 4131).



Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (LNRI Tahun 2001 Nomor 112, TLNRI Nomor 4132).

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, (LNRI Tahun 2003 Nomor 70, TLNRI Nomor 4297).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, (LNRI Tahun 2004 Nomor 67, TLNRI Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (LNRI Tahun 2004 Nomor 115, TLNRI Nomor 4430)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (LNRI Tahun 2004 Nomor 131, TLNRI Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas (LNRI Tahun 2007 Nomor 106, TLNRI Nomor 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2009 Nomor 7, TLNRI Nomor 4926).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (LNRI Tahun 2009 Nomor 133, TLNRI Nomor 5052).



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LNRI Tahun 2009 Nomor 149, TLNRI Nomor 5068).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (LNRI Tahun 2010 Nomor 130, TLNRI Nomor 5168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 111, TLNRI Nomor 5253).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (LNRI Tahun 2012 Nomor 22, TLNRI Nomor 5280).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (LNRI Tahun 2012 Nomor 212, TLNRI Nomor 5355).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LNRI Tahun 2013 Nomor 12, TLNRI Nomor 5394).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tentang Desa (LNRI Tahun 2014 Nomor 7, TLNRI Nomor 5495)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Tentang Administrasi Pemerintahan (LNRI Tahun 2014 Nomor 292, TLNRI Nomor 5601)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (LNRI Tahun 2014 Nomor 337, TLNRI Nomor 5618).



Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 24, TLNRI Nomor 5657).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (LNRI Tahun 2016 Nomor 176, TLNRI Nomor 5922).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2017 Nomor 11, TLNRI Nomor 6018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (LNRI Tahun 2019 Nomor 201, TLNRI Nomor 6412).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor 6573).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LNRI Tahun 2021 Nomor 298, TLNRI Nomor 6755).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (LNRI Tahun 2023 Nomor 4, TLNRI Nomor 6845).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (LNRI Tahun 1998 Nomor 87, TLNRI Nomor 3761).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2008 Nomor 142, TLNRI Nomor 4901).



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2022 Nomor 238, TLNRI Nomor 6841).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum (LNRI Tahun 2000 Nomor 37, TLNRI Nomor 3943).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (LNRI Tahun 2017 Nomor 305, TLNRI Nomor 6173).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanggal 17 Juni 1993.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lainnya Dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (BNRI Tahun 2017 Nomor 1069).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lainnya Dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1364, 2021).



Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 15 Desember 2022.

Vertegenwoordiging Van Den Lande In Rechten, (K.B. v. 27 April 1922.) S. 22-522

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas *Peraturan* Daerah Provinsi Bali NomoR 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

C. Dokumen Resmi

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2018. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Badan Pembina Hukum Nasional. Jakarta.

Kejaksaan Negeri Buleleng. Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-05/BLL/ TIPIKOR/11/2022. tanggal 20 Maret 2022.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Perkara Nomor: 071/PUU-II 2004 dan Perkara Nomor: 001-002/PUU-III/2005. tanggal 16 Mei 2005.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Perkara Nomor: 28/PUU-XI 2013. tanggal 28 Mei 2014.

Mahkamah Agung R.I. Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. tanggal 13 Desember 2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Ketua MA Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. tanggal 29 April 2020.



Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perkara Nomor 5078 K/Pid.Sus/2023. tanggal 18 Oktober 2023.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Tahun 2020.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor: 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst. 11 Juni 2013.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 September 2016.

Pengadilan Negeri Makassar. Putusan Nomor: 1235/Pid.B/2018/PN Mks. Tanggal 28 Januari 2019, atas nama terpidana H. Muh. Hamzah Mamba, S.HI. alias Abu Hamzah alias Hamzah alias Pak Abu alias Anca bin Sapareng Mamba.

Pengadilan Negeri Makassar. Putusan Nomor: 1379/Pid.B/2018/PN Mks. Tanggal 21 Februari 2019. atas nama terpidana Nursyahriah Mansyur alias Ibu Ria binti Mansyur Maulana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps. tanggal 4 April 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar. Putusan Nomor 9/PID.TPK/2023/PT.DPS. tanggal 16 Mei 2023.

Surat Gugatan Intervensi dari Interveniient dan Kuasa Hukum Para Interveniient, tanggal 21 Mei 2013.

Surat Jawaban Pemohon Terhadap Keberatan Yang Diajukan Oleh Ricco Akbar Investor PT. Qurnia Subur Alam Raya Dalam Sidang Permohonan Pernyataan Pailit Nomor: 09/Pdt.Sus/2013/PN. Niaga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 21 Maret 2013.



Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap PT. Qurnia Subur Alam Raya dan Ramli Araby Selaku Pribadi dan Selaku Presiden Direktur PT. Qurnia Subur Alam Raya. yang dibuat dan

ditandatangani oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cibadak. tanggal 12 April 2013.

Telaahan Gugatan Kepailitan Antara Kejaksaan Negeri Cibadak Melawan PT. Qurnia Alam Raya. berdasarkan Surat Perintah No. Print-64/O.2.32/Gs/02/2013 Tanggal 5 Februari 2013.

D. Disertasi Atau Tugas Akhir Program Studi

Anwar, Khairul. 2019. *Rekonstruksi Konsep Kepentingan Umum Dalam wewenang Jaksa Agung Mengenyampingkan Perkara Pidana*, Disertasi tidak diterbitkan. Program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dwi Putro, Widodo. 2011. *Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Disertasi tidak diterbitkan. Program Doktor Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Hanum, Habiba. 2007. *Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.

Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*. Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia. Depok.

Joseph Kersch, Terence. 1995. *The Idea of the National Interest: A Conceptual Analysis in the Context of the Gulf War*. A Thesis Submitted In Partial Fulfilment of The Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. The Faculty of Graduate Studies. Department of Political Science. The University of British Columbia. Vancouver – Canada.

Lubis, Fauziah. 2013. *Independensi Lembaga Kejaksaan di Indonesia Dalam Mengajukan Permohonan Pailit (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam)*. Hasil Penelitian. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.



o. 2016. *Formulasi Kebijakan Hukum Pemulihan Fungsi Lembaga Kepailitan Sebagai Lembaga Penyelesaian Kewajiban Debitor*.

Disertasi tidak diterbitkan. Program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Nasution, Agussalim. 2008. *Standar Kepentingan Umum Dalam Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Menurut Hukum Kepailitan*. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara. Medan.

Shubhan, M. Hadi. 2006. *Prinsip Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Disertasi tidak diterbitkan. Program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Syamsuddin, Amir. 2008. *Tinjauan Yuridis Konsep Kepentingan Umum Menurut Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Strafuitsluitingsgrond) Dalam Kegiatan Pers*. Disertasi tidak diterbitkan. Program Doktor Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Wicaksono, Bekti. 2014. *Kajian Yuridis Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundangan Kewajiban Pembayaran Utang*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

E. Jurnal, Makalah dan Artikel

Alexander, E.R. *The Public Interest in Planning: From Legitimation to Substantive Plan Evaluation*. 2002. Planning Theory SAGE Publications (London. Thousand Oaks. CA and New Delhi). Vol 1(3).

Alexy, Robert. *Gustav Radbruch's Concept of Law*. (<https://www.upjs.sk/public/media/16913/Gustav%20Radbruch's%20Concept%20of%20Law.pdf>. diunduh pada tanggal 23 Mei 2020).

Arjaya, B.G.M. Widipradnyana. 2014. *Wewenang Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepentingan Negara Terhadap Utang Pajak Subyek Hukum Dari Negara Anggota Asean Non-Indonesia Pasca Berlakunya AEC*. Jurnal Rechts Vinding Media Pembina Hukum Nasional. Volume 3. Nomor 2. Agustus 2014.



- Bitonti, Alberto. 2020. *Public Interest*, Università della Svizzera Italiana. Lugano. Switzerland. under exclusive licence to Springer Nature Switzerland P. Harris et al. (eds.). *The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs*. [PDF] [Public Interest \(researchgate.net\)](#). uploaded by Alberto Bitonti on 08 February 2021. diunduh pada tanggal 15 November 2022.
- Borelli, Silvia. 2015. *The (Mis)-Use of General Principles of Law: Lex specialis and the Relationship between International Human Right Law and the Laws of Armed Conflict*. Forthcoming to be published in Laura Pineschi (ed.), *General Principles of Law: The Role of the Judiciary* (Springer. 2015).
- Campbell, Heather. & Robert Marshall. 2000. *Moral obligations, planning, and the public interest: a commentary on current British practice*. *Environment and Planning B: Planning and Design* 2000. volume 27.
- Cappelletti, Mauro. 1975. *Governmental And Private Advocates For The Public Interest In Civil Litigation: A Comparative Study*. *Michigan Law Review*. Volume 75. Issue 5. diunduh dari <https://repository.law.umich.edu/mlr/vol73/iss5/2> pada tanggal 22 November 2022.
- Dionne Jr. E. J. 2007. *Why The Publik Interest Matters Now*. *Daedalus*. *Jurnal of American Academy of Arts & Sciences*. Volume 136. Number 4.
- Economics in Context Initiative. 2021. *Comparative Economic Systems: Capitalism and Socialism in the 21st Century*. An ECI Teaching Module on Social and Economic Issues. Global Development Policy Center. Boston University.
- Goyette, John. 2013. *On the Transcendence of the Political Common Good Aquinas versus the New Natural Law Theory*. *The National Catholic Bioethics Quarterly*. Spring. ([goyette-transcendence-political-common-good.pdf \(thomasaquinas.edu\)](#)). diunduh pada tanggal 2 Juni 2023.



Hend. 2021. *Bentham: Punishment and the Utilitarian Use of Persons as Means*, *Journal of Bentham Studies* is a peer-reviewed open-access journal. 19(1). UCLPRESS.

Hennis, Wilhelm. 1994. *The Meaning of "Wertfreiheit" On the Background and Motives of Max Weber's "Postulate"*. Sociological Theory. Vol. 12. No. 2. American Sociological Association. 1722 N Street NW. Washington DC.

Irwansyah et.al. 2020. *Initiating Omnibus Law in Environmental Field In Indonesia: Between Tradition And Renewal*. European Journal of Molecular & Clinical Medicine. ISSN 2515-8260. Volume 07. Issue 07.

Kartikasari, R. 2017. *Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Berdasarkan Kepentingan Umum Sebagai Sarana Penyelesaian Utang Piutang Dihubungkan Dengan Perlindungan Terhadap Kreditor*. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER. vol. 3. No. 2. (Juli – Desember 2017).

Kloosterhuis, Harm. 1998. *The Reconstruction of Legal Analogy-Argumentation: Monological and Dialogical Approaches*. OSSA Conference Archive. 66.

Jaede, Maximilian. *The Concept of the Common Good*, Working Paper to British Academy project on "Negotiating Inclusion in Times of Transition" and also forms part of the Working Paper Series of the Political Settlements Research Programme (PSRP) of the University of Edinburgh. The PSRP is funded by the UK Department for International Development.

Marx, Karl. *Opposition of the Materialist and Idealist Outlook*, <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01b.htm>, diakses pada tanggal 4 Juni 2023.

Maxeiner, James. 2007. *Legal Certainty And Legal Methods: A European Alternative to American Legal Indeterminacy?*. Scholar Works @ University of Baltimore School of Law.

Méthot, Jean-François. 2003. *How to Define Public Interest?*. Collège dominicain de philosophie et de théologie Ottawa ON Canada. disampaikan saat The EPAC Round-Table held at Saint Paul University. ([How to Define Public Interest \(ustpaul.ca\)](http://ustpaul.ca)). diunduh pada tanggal 29 Nopember 2022).



rik C. 2012. *Higher Education Research Policy Connection: How Intermediaries May Impact State-level Policy*. Louise Mcbee Institute of Higher Education. University of Georgia, [Higher](#)

[Education Research Policy Connection: How Intermediaries May Impact State-level Policy | Institute of Higher Education \(uga.edu\)](#). diakses pada tanggal 3 Juli 2023.

Osborne, Thomas. 2022. *Power Degree Zero: Montesquieu, Tocqueville, Despotism*, Journal of Political Power. Vol. 15. No. 2. Published by Informa UK Limited. trading as Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2022.2061128>, diunduh pada tanggal 17 Juni 2023.

Pietrzyk-Reeves, Dorota. 2006. *Deliberative Democracy and Citizenship*. Polish Political Science. Yearbook. Vol. XXXV.

Radbruch, Gustav. 2006. *Five Minutes of Legal Philosophy (1945)*. Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. Oxford Journal of Legal Studies. Vol. 26. No. 1.

Rekosh, Edwin. 2005. *How Defines The Public Interest?*. SUR-International Journal of Human Rights. Year 2. Number 5.

Rodrigues, Pablo Martin. 2016. *The Principle Of Legal Certainty And The Limits To The Applicability Of EU Law*. ResearchGate. Januari 2016.

Shubhan, M. Hadi. 2020. *The Effects of Reforming Regulation in Resolving Insolvency towards EODB Rank Improvement: Evidence from Indonesia*. Int Insolv Rev. 2020.

Stuart Mill, John. 1863. *Utilitarianism*. chapter 4 <http://www.utilitarianism.com/mill1.htm>, diunduh pada tanggal 22 November 2011.

Vivi Yusanti, Erlinda. 2022. *Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai dengan Anggaran Dasar*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol. 1 (Issue 3).

Wolfson, Adam. 2007. *Public Interest Lost?*. Daedalus. Vol. 136. No. 4. On the Public Interest (Fall. 2007). Published by: American Academy of Arts & Sciences. The MIT Press are collaborating with JSTOR to digitize. preserve and extend access to Daedalus.



Philip R. 1995. *Principles of International Insolvency (Part i)*. Allen & Overy, diunduh dari: ([Principles of international insolvency \(part](#)

[I\) - Wood - 1995 - International Insolvency Review - Wiley Online Library](#)). pada tanggal 4 Juli 2023.

F. Siaran Pers Dan Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring, [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](#) , diakses pada tanggal 7 Juli 2023

BUMN. Kementerian. Portopolio. Kluster. ([Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia \(bumn.go.id\)](#)). diakses pada tanggal 4 Juli 2023

Idris, Muhammad. 2024. Sistem Ekonomi yang Dianut Indonesia dan Penerapannya, Kompas.com. 20 Februari 2024. [Sistem Ekonomi yang Dianut Indonesia dan Penerapannya \(kompas.com\)](#). diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

Online.com, Hukum. 2012. *Jaksa Pernah Ajukan Pailit Demi Kepentingan Umum*, Berita, Rabu 20 Juni 2012. (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe179a67ba94/jaksa-pernah-ajukan-pailit-demi-kepentingan-umum/>). diakses pada tanggal 23 Mei 2020).

Practical Law, *EC Regulation on insolvency proceedings (Insolvency Regulation 2000)*, [EC Regulation on insolvency proceedings \(Insolvency Regulation 2000\) | Practical Law \(thomsonreuters.com\)](#), diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

Stephany, Happy R. 2013. *Kejaksaan Ajukan Pailit Perusahaan Agribisnis*, Hukum Online.com. Jumat 8 Maret 2013. (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5139dbe165b3a/kejaksaan-ajukan-pailit-perusahaan-agribisnis/>). diakses pada tanggal 26 Mei 2020).

Anthony, Rio. *Jaksa Serahkan Harta Sitaan Abu Tours ke Kurator*. Tegar.id. 7 Februari 2020. [Jaksa Serahkan Harta Sitaan Abu Tours ke Kurator | Tegar](#). diakses pada tanggal 7 Maret 2024.



ang MPI. *5 Kasus Penipuan Jamaah Umrah Paling Fenomenal, Kerugian Capai Triliunan*. Oke News. Senin 18 Oktober 2021. [5 Kasus Penipuan Jamaah Umrah Paling Fenomenal, Kerugian](#)

[Capai Triliunan : Okezone Nasional](#). diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

G. Laporan Hasil Penelitian

Deffains, Bruno. and Kessedjian Catherine. 2015. *Index Of Legal Certainty*. Report for the Civil Law Initiative. May 2015.

Price Water House Coopers LLP, 2009, *Insolvency in Brief: A Guide to Insolvency Terminology and Procedure*, Business Recovery Service, UK's, [insolvency-in-brief.pdf \(pwc.co.uk\)](#), diunduh pada tanggal 4 Juli 2023.

Rodrigues, Pablo Martin. 2016. *The Principle Of Legal Certainty And The Limits To The Applicability Of EU Law*. ResearchGate. Januari 2016.

The World Bank. 2016. *Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes*. International Bank for Reconstruction and Development. Woshington DC.

